

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN OKU

Oleh :

Eka Meiliya Dona¹⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Baturaja

Email: lia.meliyadona@gmail.com

Verza Ayu Lestari²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Baturaja

Email: Verzaayulestari20@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 19 Februari 2020

Direview : 17 Maret 2020

Disetujui : 01 Nov 2020

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the financial performance of the OKU Regency Revenue Agency office analyzed from the 2013-2017 budget realization report. The method used is descriptive quantitative using economic levels, efficiency, and effectiveness. From the results of the analysis it was concluded that the financial performance based on the analysis of economic levels in 2013-2017, namely varied economic rates averaged 89.48% with criteria quite economical, this shows the ability of the government to economize spending is quite good. The level of efficiency in the OKU Regency Revenue Agency increased from year to year, the average efficiency level in 2013-2017 was 62.58% with efficient criteria because the realization of local tax revenue was greater than the costs incurred to collect local taxes, this shows the government's ability to streamline income and expenditure is good. And the level of effectiveness of PAD revenue is fixed or stable from year to year, the average level of effectiveness in 2013-2017 is 114.39% with very effective criteria, this shows the ability of the government to achieve the revenue budget set by the OKU Regency Revenue Agency is very effective.

Keyword : Economy, Efficiency, Effectiveness

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dianalisis dari laporan realisasi anggaran tahun 2013-2017. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa kinerja keuangan berdasarkan analisis tingkat ekonomi tahun 2013-2017 yaitu bervariasi tingkat ekonomi rata-rata sebesar 89,48% dengan kriteria cukup ekonomis hal ini menunjukkan kemampuan pemerintahan dalam mengekonomiskan belanja sudah cukup baik. Tingkat efisiensi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU meningkat dari tahun ke tahun rata-rata tingkat efisiensi tahun 2013–2017 sebesar 62,58% dengan kriteria efisien karena realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah, hal ini menunjukkan kemampuan pemerintahan dalam mengefisienkan pendapatan dan belanja sudah baik. Dan tingkat efektivitas penerimaan PD bersifat tetap atau stabil dari tahun ke tahun rata-rata tingkat efektivitas tahun 2013–2017 sebesar 114,39% dengan kriteria sangat efektif hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mencapai anggaran pendapatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan daerah Kabupaten OKU sudah sangat efektif.

Kata Kunci : Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas

PENDAHULUAN

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sektor pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2018:1).

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah tentang otonomi daerah yang menjelaskan bahwa setiap daerah diberi tanggung jawab untuk mengelola keuangannya sendiri. Maka dalam hal ini penyusunan laporan realisasi anggaran yang baik sangatlah penting untuk menilai kinerja keuangan pada instansi yang terkait. Dalam rangka mendukung sistem pemerintahan guna memperbaiki kesejahteraan rakyat, saat ini otonomi daerah sudah memberlakukan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan dikeluarkan lagi kebijakan tentang UU No. 33

Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya agar tidak bertentangan dengan kebijakan dan dasar negara Indonesia.

Menurut Mahsun (2015:120) Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumberdaya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastiaan atas sumberdaya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) K1abupaten OKU Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	10.194.430.068,00	11.602.488.731,13
2014	15.546.290.806,00	16.848.363.805,00
2015	17.746.835.726,00	18.510.259.185,83
2016	13.960.983.531,00	17.860.612.973,42
2017	32.808.004.898,00	38.559.592.287,22
Tahun	Belanja	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	12.098.464.227,00	10.544.980.313,00
2014	12.516.618.476,00	11.537.793.923,00
2015	14.168.406.552,00	11.708.180.709,00
2016	11.797.445.128,00	11.076.303.250,00
2017	11.902.636.263,00	10.897.913.119,00

Sumber: Data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten OKU

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada realisasi pendapatan daerah Kabupaten OKU setiap tahunnya melebihi target yang dianggarkan dan realisasi belanja daerah Kabupaten OKU dari tahun ke tahun tidak melebihi target belanja, akan tetapi pada realisasi pendapatan dan realisasai belanja mengalami fluktuasi, fluktuasi yaitu ketidaketapan kadang mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan pada pendapatan dan belanja daerah di tiap tahunnya. Bisa saja anggaran lebih besar dari realisasi dikarenakan adanya faktor luar seperti

kenaikan harga infalasi mendadak sehingga mempengaruhi penggunaan belanja dari anggaran atau adanya ketidakekonomisan penggunaan anggaran mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak tepat.

Sebaliknya dilihat dari sisi alokasi anggaran lebih besar dari apa yang terealisasi hal ini berarti Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU tidak menggunakan penyerapan anggaran sesuai rencana atau kinerja dengan tidak ekonomis, hal ini bisa terjadi karena program yang direncanakan sudah

dilaksanakan dengan baik meskipun realisasi tidak sesuai atau lebih kecil dari anggarannya.

Sebaliknya bisa saja penyerapan anggaran yang tidak ekonomis disebabkan kinerja yang kurang baik atau adanya program yang tidak dijalankan sehingga menimbulkan permasalahan yang menyebabkan kinerja instansi tidak berjalan dengan baik atau kinerja yang buruk dari pemerintah itu sendiri. Dapat dilihat bahwa realisasi belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU ini pada tahun 2013 hampir 100% dari realisasi pendapatan dan itu dikatakan kurang efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja yaitu biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, dan perubahan jumlah cakupan layanan.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu daerah, salah satu yang harus dicapai adalah kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berkelanjutan.

Kinerja pendapatan di nilai baik apabila realisasinya lebih besar daripada anggarannya, karena anggaran pendapatan merupakan batas minimal atas pendapatan yang harus diperoleh. Sebaliknya kinerja belanja dinilai baik apabila realisasinya tidak melampaui target anggarannya, sebab anggaran belanja merupakan batas maksimal belanja yang boleh dilakukan (Mahmudi, 2016:66). Berdasarkan uraian penjelasan pendapatan dan belanja daerah yang berfluktuasi maka perlu dilakukan suatu penilai atau pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang dikur berdasarkan tingkat rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas agar pemerintah kabupaten OKU serta masyarakat umum dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dalam mengelola keuangan daerahnya. Hal ini juga menjadi jalan yang baik untuk menciptakan Kabupaten OKU sebagai daerah yang tertib dan transparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good governance*) dimata publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang akan diangkat pada penelitian ini yaitu, bagaimana tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas laporan realisasi anggaran dalam menilai kinerja keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun 2013-2017?. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas laporan

realisasi anggaran dalam menilai kinerja keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun 2013-2017.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2010:3) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

Akuntansi Keuangan Daerah

Peraturan pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Yang dimaksud daerah disini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undang. Daerah otonom ini terdiri pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Karena pemerintah daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Mahsun (2015:120) Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumberdaya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastiaan atas sumberdaya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber dan digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi Anggaran

Menurut Mahsun (2015:65) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik

dan pelaksanaan program-program yang di biayai dengan uang publik. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas.

Proses penyusunan anggaran bertujuan untuk:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Faktor dominan dalam proses penganggaran:

1. Tujuan dan target yang hendak dicapai.
2. Ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah.
3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah terbaru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam dan sebagainya.

Kinerja Sektor Publik

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Menurut Fahmi (2014:2) Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam suatu periode tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran Untuk Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun (2018:181) pengukuran kinerja berdasarkan indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan. Dengan demikian teknik ini sering disebut ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Ekonomi

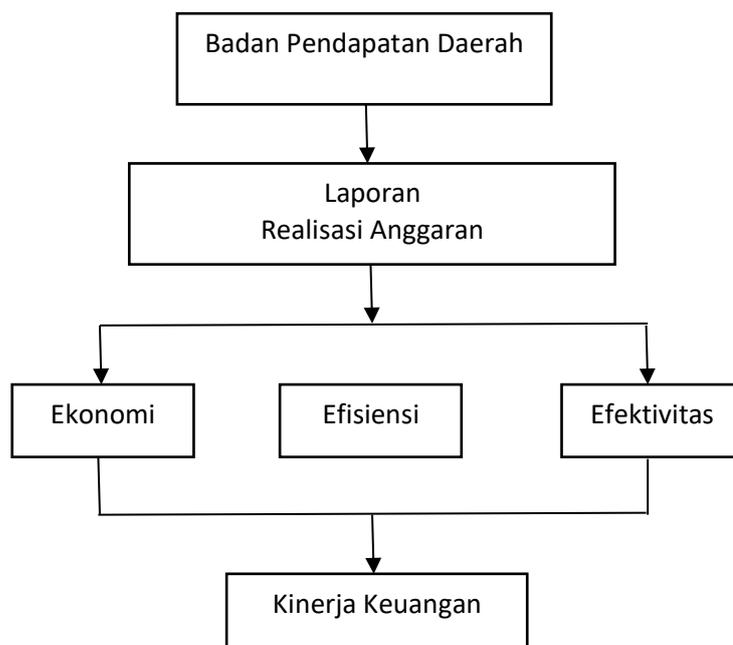
Menurut Mardiasmo (2018:165) Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cash of input*). Dengan kata lain ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa *input* dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Pengertian ekonomi (hemat/tepat/guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018:165) menyatakan bahwa efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit atau organisasi (misalnya: sataf, upah, biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan.

Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018:166) menyatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dari Tahun 2013 sampai dengan 2017. Peneliti menganalisis Laporan Realisasi Anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun 2013-2017 dengan menggunakan tiga rasio yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Kuncoro (2013:148) Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data tersebut merupakan dokumentasi dari ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten OKU Tahun 2013-2017. Data penelitian ini merupakan data *time series* (runtut waktu) tahun 2013-2017. Data yang dimaksud adalah data Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU. Data yang diperoleh dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum yang sesuai dengan data sekunder yang dibutuhkan dan kemudian diolah oleh penulis/peneliti.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kuantitatif, karena dalam penelitian ini data yang dikumpulkan, disusun, dianalisis, dan menginterpretasikan dengan cara mendeskripsikan hasil yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2008:206) Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Kuncoro (2013:145) Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).

Dasar analisis yang digunakan pada penelitian ini merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu:

Tingkat Ekonomi

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\% \dots \dots (1)$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat ekonomi penerimaan PAD sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak ekonomis.

2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang ekonomis.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka belanja anggaran dikatakan cukup ekonomis.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan ekonomis.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat ekonomis.

Tingkat Efisiensi

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \dots \dots (2)$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka realisasi belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka realisasi belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka realisasi belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka realisasi belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka realisasi belanja dikatakan sangat efisien.

Tingkat Efektivitas

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\% \dots \dots (3)$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas penerimaan PAD sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka penerimaan PAD dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka penerimaan PAD dikatakan efektif.

3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka penerimaan PAD dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka penerimaan PAD dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka penerimaan PAD dikatakan tidak efektif.

Pada analisis tersebut dijelaskan bahwa kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU membahas tentang pendapatan dan belanja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU tahun 2013-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sudah diolah atau yang biasa disebut data sekunder. Data sekunder didapat dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data oleh penulis melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum yang sesuai dengan data sekunder yang dibutuhkan dan kemudian diolah oleh penulis/peneliti.

Pengukuran ekonomis (kehematan) sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan anggarannya, pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data realisasi pengeluaran dengan anggarannya. Berdasarkan perhitungan nilai ekonomi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU tahun 2013-2017 dengan hasil tingkat ekonomi sebagai berikut:

Tabel 2
Perhitungan Ekonomi Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun 2013-2017

Tahun	Anggaran Pengeluaran (Rp)	Realisasi Pengeluaran (Rp)	Tingkat Ekonomi (%)	Kriteria
2013	12.098.464.227,00	10.544.980.313,00	87,16	Cukup Ekonomis
2014	12.516.618.476,00	11.537.793.923,00	92,18	Kurang Ekonomis
2015	14.168.406.552,00	11.708.180.709,00	82,64	Cukup Ekonomis
2016	11.797.445.128,00	11.076.303.250,00	93,89	Kurang Ekonomis
2017	11.902.636.263,00	10.897.913.119,00	91,56	Kurang Ekonomis

Sumber: Data sekunder 2019 (diolah)

Berdasarkan analisis tabel 2 anggaran pengeluaran lebih besar daripada realisasinya itu dikatakan baik. Hal ini sesuai dengan teori Mahmudi (2016:66) kinerja belanja dinilai baik apabila realisasinya tidak melampaui target anggarannya, sebab anggaran belanja merupakan batas maksimal belanja yang boleh dilakukan.

Selama periode tahun 2013-2017, menunjukkan bahwa tingkat ekonomi belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dari tahun 2013-2017 bervariasi, dengan hasil persentase dari rasio di atas dapat diketahui bahwa tingkat ekonomi pada tahun 2013 adalah 87,16% dengan kriteria cukup ekonomis, tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 5,02% menjadi 92,18% dengan kriteria kurang ekonomis, tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 9,54% menjadi 82,64% dengan kriteria cukup ekonomis, tahun 2016 mengalami penurunan kembali sebesar 11,25% menjadi 93,89% dengan kriteria kurang ekonomis, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,33% menjadi 91,56% masih dalam kriteria kurang ekonomis. Semakin kecil rasio ekonomi berarti kinerja keuangan semakin baik. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 Tahun 1996.

Berdasarkan perhitungan ekonomi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU di lihat dari laporan realisasi anggaran tahun 2013-2017 dari hasil perhitungan rasio ekonomis menunjukkan bahwa

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU kurang mengekonomiskan penggunaan belanja sesuai yang ditargetkan dengan tingkat ekonomis yang hampir mendekati 100%.

Rata-rata tingkat ekonomi tahun 2013–2017 sebesar 89,48% berada dalam pencapaian 80%-90% yaitu dalam kriteria cukup ekonomis. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dapat dikatakan cukup ekonomis. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintahan dalam mengekonomiskan belanja sudah cukup baik walaupun masih dalam kriteria cukup ekonomis. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU harus memperhatikan kebutuhan yang diperlukan agar tidak ada pemborosan dan dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu untuk pengeluaran lebih ekonomis dan lebih baik lagi.

Pengukuran efisiensi dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan sumber dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*. Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah. Berdasarkan perhitungan nilai efisiensi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU tahun 2013-2017 dengan hasil tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan Efisiensi Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Pengeluaran (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2013	10.544.980.313,00	11.602.488.731,13	90,89	Kurang Efisien
2014	11.537.793.923,00	16.848.363.805,00	68,48	Efisien
2015	11.708.180.709,00	18.510.259.185,83	63,25	Efisien
2016	11.076.303.250,00	17.860.612.973,42	62,02	Efisien
2017	10.897.913.119,00	38.559.592.287,22	28,26	Sangat Efisien

Sumber: Data sekunder 2019 (diolah)

Berdasarkan analisis tabel 3 bahwa selama periode tahun 2013-2017, Menunjukkan bahwa tingkat efisiensi realisasi pengeluaran dan realisasi pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU meningkat dari tahun ke tahun artinya kinerja keuangan dikatakan baik, dengan hasil persentase dari rasio di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2013 merupakan tingkat tertinggi ketidakefisiennya yaitu mencapai 90,89% dengan kriteria kurang efisien, tahun 2014 mengalami

peningkatan sebesar 22,41% yaitu menjadi 68,48% dengan kriteria efisien, tahun 2015 mengalami peningkatan kembali sebesar 5,23% yaitu menjadi 62,02% dengan kriteria efisien, tahun 2016 mengalami peningkatan kembali walaupun sedikit yaitu sebesar 1,23% menjadi 62,02% dengan kriteria efisien, dan tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 33,76% menjadi 28,26% dengan kriteria sangat efisien. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan semakin baik. Hal ini dapat dilihat

pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 Tahun 1996.

Berdasarkan perhitungan efisiensi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU di lihat dari laporan realisasi anggaran tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi realisasi belanja dan realisasi pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU meningkat dari tahun ke tahun.

Rata-rata tingkat efisiensi tahun 2013–2017 sebesar 62,58% berada dalam pencapaian 60%-80% yaitu dalam kriteria efisien. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dapat dikatakan efisien. Hal ini

menunjukkan kemampuan pemerintahan dalam mengefisienkan pendapatan dan belanja sudah cukup baik.

Pengukuran efektifitas yaitu ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Berdasarkan perhitungan nilai efektivitas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU tahun 2013-2017 dengan hasil tingkat efektivitas sebagai berikut:

Tabel 4. Perhitungan Efektivitas Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun 2013-2017

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2013	10.194.430.068,00	11.602.488.731,13	113,81	Sangat Efektif
2014	15.546.290.806,00	16.848.363.805,00	108,38	Sangat Efektif
2015	17.746.835.726,00	18.510.259.185,83	104,30	Sangat Efektif
2016	13.960.983.531,00	17.860.612.973,42	127,93	Sangat Efektif
2017	32.808.004.898,00	38.559.592.287,22	117,53	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder 2019 (diolah)

Berdasarkan analisis tabel 4 anggaran pendapatan lebih kecil daripada realisasinya itu dikatakan baik. Hal ini sesuai dengan teori Mahmudi (2016:66) kinerja pendapatan di nilai baik apabila realisasinya lebih besar daripada anggarannya, karena anggaran pendapatan merupakan batas minimal atas pendapatan yang harus diperoleh.

Bahwa selama periode tahun 2013-2017, tingkat efektivitas penerimaan PAD bersifat tetap atau stabil dari tahun ke tahun, dengan hasil persentase dari rasio di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 tingkat efektivitas sebesar 113,81% yaitu dengan kriteria sangat efektif, tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 5,43% menjadi 108,38% namun masih dalam kriteria sangat efektif, tahun 2015 mengalami penurunan lagi sebesar 4,08% menjadi 104,30% masih dalam kriteria sangat efektif, tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 23,63% menjadi 127,93% kriterianya masih sangat efektif, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar 10,40% menjadi 117,53% dan masih dalam kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas penerimaan PAD dari keseluruhan sangat efektif karena sudah mencapai lebih dari 100%. Pada tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU penerimaan hasil PAD paling tinggi yakni sebesar 127,93% yaitu dalam kriteria sangat efektif. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan realisasi

anggaran yang semakin baik. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 Tahun 1996.

Berdasarkan perhitungan efektivitas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU di lihat dari laporan realisasi anggaran tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PAD bersifat tetap atau stabil dari tahun ke tahun.

Rata-rata tingkat efektivitas tahun 2013–2017 sebesar 114,39% berada dalam pencapaian 100% yaitu dalam kriteria sangat efektif. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dapat dikatakan sudah sangat efektif. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintahan dalam mencapai anggaran pendapatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan di Badan Pendapatan daerah Kabupaten OKU.

Tingkat Ekonomi, Efisien dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada kantor Badan Pendapatan daerah Kabupaten OKU berdasarkan analisis pengukuran 3E yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas selama lima tahun terakhir (2013-2017) di lihat dari laporan realisasi anggaran, maka berdasarkan analisis

pengukuran 3E pada kantor Badan Pendapatan daerah Kabupaten OKU didapatkan hasil pembahasan sebagai berikut.

Tingkat ekonomi tahun 2013–2017 sebesar 89,48% yaitu dalam kriteria cukup ekonomis. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dapat dikatakan cukup ekonomis. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintahan dalam mengekonomiskan belanja sudah cukup baik walaupun masih dalam kriteria cukup ekonomis. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU harus memperhatikan kebutuhan yang diperlukan agar tidak ada pemborosan dan dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu untuk pengeluaran lebih ekonomis dan lebih baik lagi.

Tingkat efisiensi tahun 2013–2017 sebesar 62,58% yaitu dalam kriteria efisien. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dapat dikatakan efisien. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintahan dalam mengefisienkan pendapatan dan belanja sudah cukup baik.

Tingkat efektivitas tahun 2013–2017 sebesar 114,39% yaitu dalam kriteria sangat efektif. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dapat dikatakan sudah sangat efektif. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintahan dalam mencapai anggaran pendapatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan di Badan Pendapatan daerah Kabupaten OKU.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU untuk tingkat ekonomi sudah dikatakan cukup ekonomis, untuk tingkat efisiensi sudah dikatakan efisien, dan tingkat efektivitas sudah dikatakan cukup efektif

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data keuangan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dianalisis dari laporan realisasi anggaran 2013-2017 dengan menggunakan tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat dan kriteria ekonomis anggaran belanja dengan realisasi belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU tahun 2013-2017 yaitu bervariasi. Rata-rata tingkat ekonomi tahun 2013–2017 sebesar 89,48% berada dalam pencapaian 80%-90% yaitu dalam kriteria cukup ekonomis. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dapat dikatakan cukup ekonomis karena anggaran belanja lebih besar daripada realisasinya itu dikatakan baik, hal ini

- menunjukkan kemampuan pemerintahan dalam mengekonomiskan belanja sudah cukup baik.
2. Tingkat dan kriteria efisiensi realisasi belanja dengan realisasi pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU tahun 2013-2017 Menunjukkan bahwa tingkat efisiensi realisasi belanja dan pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata tingkat efisiensi tahun 2013–2017 sebesar 62,58% berada dalam pencapaian 60%-80% yaitu dalam kriteria efisien. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dapat dikatakan efisien karena realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah, hal ini menunjukkan kemampuan pemerintahan dalam mengefisienkan pendapatan dan belanja sudah baik.
3. Tingkat dan kriteria efektivitas anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU tahun 2013-2017 tingkat efektivitas penerimaan PAD bersifat tetap atau stabil dari tahun ke tahun. Rata-rata tingkat efektivitas tahun 2013–2017 sebesar 114,39% berada dalam pencapaian 100% yaitu dalam kriteria sangat efektif. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU sudah sangat efektif, hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mencapai anggaran pendapatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan daerah Kabupaten OKU.

DAFTAR PUSTAKA

- A.N.J. Dien., dkk. 2015. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 3, No. 1. (2015). Hal. 534-541.
- Ardila dan Putri, 2015. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan *Value For Money* pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 15, No. 1. (2015). Hal. 78-85.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Indonesia*. BPFY-Yogyakarta.

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Tiga. Erlangga. Yogyakarta.
- Bisma Dan Susanto, 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Universitas Mataram. Mataram. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*. Vol 4. No. 3. (2010). Hal. 75-86.
- Fahmi, Irham. 2014. Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Honga Dan Ilat, 2014. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA Vol.2 No.4 (2014)*. Hal. 278-288.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekinomi*. Edisi Empat. Erlangga.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, dkk. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPFY-Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFY-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Moehariono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, cv, Bandung.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Untuk SKPD*. Alfabeta, cv, Bandung.